

POLITIK NU KEMBALI KE KHITTAAH



M. Said Budairy

Mantan Sekretaris Tim Tujuh untuk Pemulihan Khittah NU 1926 dan Mantan Direktur PP Lakpesdam NU (1987-1995) dan kini sebagai Ketua Komisi Informas dan Komunikasi.

Momentumnya tepat untuk menimbang pelaksanaan atau praktik politik NU kembali ke Khittah 1926. Tepat karena telah dan akan terus berlangsung banyak Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), tepat karena baru selesai Pileg (Pemilihan Anggota Legislatif) dan menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Tepat pula untuk melakukan refleksi 25 tahun perjalanan NU sejak mencanangkan diri kembali ke Khittah 1926.

Setelah mengalami lebih dari dua dekade menjadi Partai Nahdlatul Ulama, pada 1970-an NU kehilangan arah gerak setelah memfusikan kegiatan politiknya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan

(1973). Pengalaman berpolitik praktis selama dua dekade (1952-1973) itu membuat para pemimpinnya menemui kesulitan untuk banting setir. Walau sudah menyatakan NU bukan lagi sebagai partai politik. Sudah kembali menjadi jam'iyah diniyyah/ijtima'iyah.

Kesepakatan Nahdlatul Ulama kembali ke khittah 1926 ditetapkan dalam Muktamar NU ke-27 yang berlangsung di Pesantren Salafiah Syafi'iah Sukorejo, Situbondo, tanggal 8-12 Desember 1984. Mendasarkan pada keputusan muktamar itu, NU menetapkan jam'iyah ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Visi dan gerakan politik NU dirumuskan dalam kerangka strategis dan berjangka panjang. NU memahami dan bersikap bahwa penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pemahaman dan sikap tersebut, NU berharap dapat menciptakan kebudayaan politik yang sehat di negeri ini.

Sikap tersebut dikuatkan oleh keputusan Muktamar NU ke 28 di Yogyakarta tahun 1989, yang melahirkan Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU. Dian-

tara isinya menyebutkan, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Prinsip-prinsip yang bagus itu oleh Mukhtar NU ke-30 di Kediri tahun 1999 tetap direkomendasikan agar menjadi pegangan seluruh warga NU.

Patut dicatat dan digarisbawahi amanat Rais Aam PBNU, K.H. Ahmad Siddiq, yang juga “arsitek kepala” kembalinya NU ke Khittah NU 1926. Amanat yang disampaikan pada saat pembukaan Mukhtar NU ke-28, Kongres Muslimat NU ke-12 dan Kongres Fatayat NU ke 10 di Yogyakarta. Kiai Ahmad Siddiq mengatakan, Nahdlatul Ulama adalah ibarat kereta api yang sejak semula sudah jelas trayeknya, bahkan relnya dan persyaratan untuk menjadi petugas-petugasnya. NU bukan seperti taksi yang dapat dibawa ke mana saja oleh “penyewanya”. NU bukan kopor yang dapat diisi apa saja oleh “pembawanya”. Orang-orang yang mengurus dan memimpin NU boleh saja berganti-ganti. Kebijakan mengemudikannya boleh diubah dan disempurnakan, tapi trayek tidak boleh berubah.

Kata beliau lagi, Khittah NU menegaskan kedudukan NU sebagai

Jam’iyyah Diniyyah/Ijtima’iyyah bukan partai politik. Sama sekali tidak berarti mengharamkan politik atau melarang warganya berpolitik. Bagi NU, politik adalah sangat penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagaimana ekonomi, perniagaan dan perdagangan adalah sangat penting. NU menghargai warganya yang berpolitik atau berniaga dengan baik. Hanya, mereka dipersilahkan melakukannya dalam organisasi politik atau organisasi niaga, tidak di dalam NU. Karena NU bukan organisasi politik, bukan organisasi niaga. Banyak garapan yang harus ditangani langsung oleh NU, yang selama ini terbengkalai, tidak digarap oleh NU sebagai organisasi.

Selama sekitar 30 tahun NU dipimpin tanpa pergantian ketua umum. Era K.H. Idham Chalid berakhir dalam Mukhtar ke-27 di Situbondo. Penggantinya K.H. Abdurrahman Wahid, melalui penunjukan Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang dipimpin K.H. As’ad Syamsul Arifin dan dikokohkan oleh muktamar. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terkesan mengikuti ritme NU sebagai jam’iyyah yang benar-benar tampil sebagai kekuatan moral dan gerakan kultural murni. Namun pada akhir periode kedua kepemimpinannya, mulai terjadi proses perubahan dalam tubuh NU. Selain tetap memelihara jati diri NU sebagai kekuatan moral, Gus Dur mulai bermanuver sebagai kelompok penekan (pressure group) terhadap kekuasaan. Meskipun itu dilakukannya dengan sering kali me-

nyampingkan aturan-aturan organisatoris. Gus Dur menampilkan NU beda dengan tradisi politik yang berlaku saat itu, terutama dengan keberaniannya untuk berbeda dengan penguasa.

Sebagai kekuatan moral yang juga berfungsi sebagai kelompok penekan, sejak itu setiap kiprah NU tidak hanya dipahami sebagai gerakan moral, tetapi juga mulai dibaca dalam terminologi dan dipandang mengandung muatan politik. Namun, karena secara resmi NU tetap sebagai ormas keagamaan Islam, maka wacana politik NU dikenali melalui sikap dan pernyataan politik Gus Dur. Untuk mengetahui bagaimana visi politik NU, orang lalu merasa cukup melihat dan mengenali apa yang dilakukan Gus Dur. Apakah itu pendirian resmi organisasi NU atau pandangan pribadi Gus Dur, nyatanya begitu orang melihatnya.

Gus Dur memang baru terlibat dalam usaha memulihkan NU kembali ke Khittah NU 1926 ketika kelompok orang-orang muda waktu itu sudah berjalan lumayan jauh. Awal mulanya, gagasan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran pembinaan dan pengembangan NU yang selaras dengan khittah NU 1926 itu muncul dari beberapa warga NU yang merasa prihatin terhadap perkembangan NU. Dalam berbagai percakapan yang mereka lakukan sejak paruh kedua 1970-an, mulai terlihat "sebab-musabab" mundurnya NU hampir di semua lini perjuangannya. Begitu banyak hal-hal yang sudah tercapai terbengkalai. Yang di tangan terlepas sementara tangannya seolah mengapai-gapai hendak mencari sesuatu

yang bukan capaian pokok, bila dilihat dari tujuan dilahirkannya NU. Masalah yang dirasakan oleh beberapa warga NU itu ternyata juga menjadi pikiran banyak warga NU lainnya, baik yang bermukim di Jakarta maupun di daerah-daerah.

Perkembangannya kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1983 berkumpul 24 orang yang kemudian disebut Majelis 24. Mereka berpikir, berdiskusi, dan akhirnya memutuskan membentuk satu tim (disebut Tim Tujuh) yang ditugasi merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU yang sesuai dengan khittah NU 1926. Ditugasi merumuskan pola kepemimpinan NU yang sesuai dengan perkembangan NU serta menetapkan garapan yang hendak diterjuni.

Karena kondisi NU ketika itu, baik identitas yang berupa perangkat nilai maupun perangkat keorganisasian, tak jelas ujung pangkalnya, maka pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926 menetapkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan. *Pertama*, menampilkan kembali identitas NU melalui usaha-usaha nyata dengan mendasarkan pada sejumlah kaidah; perluasan arti ibadah, dinamisasi pemahaman hukum Islam (fiqih), penumbuhan budaya politik kenegaraan yang memelihara martabat manusia Pancasila sebagai warga Negara RI, pengembangan peran dan potensi, pengembangan sistem dan pola kepemimpinan yang mampu menangani seluruh bidang garapan dan bekerja berencana.

, penataan kembali wadah/organisasi NU untuk mendukung citra NU sebagai

organisasi sosial keagamaan. Perjuangan melalui jalur politik praktis hanyalah bagian kecil saja dari perjuangan semesta NU dan itu pun tidak perlu ditangani langsung oleh NU karena dikhawatirkan akan mengganggu bagian-bagian perjuangan lainnya.

Penataan seperti itu dimaksudkan untuk mengakhiri situasi yang tidak menguntungkan, yakni munculnya sikap ambivalensi pada aktivitas dan langkah yang dilakukan NU. Sebab itu, penataan terdiri dari langkah-langkah: (1) mengakhiri masa transisi sifat keorganisasian NU sebagai partai politik menjadi jam'iyah diniyyah, organisasi sosial keagamaan, (2) menegaskan kejam'iyahan NU dalam struktur organisasi, (3) penyerderhanaan bagian-bagian dalam struktur NU.

Langkah lainnya adalah pemantapan program yang mendukung pemulihan Khittah NU 1926. Intinya terletak pada

upaya mengangkat kembali bidang garapan yang telah sempat terabaikan dan menekan kegiatan yang kurang membawa manfaat langsung pada keseluruhan masa depan warga. Dalam implementasinya, kegiatan NU tidak terpusat pada hal-hal politis belaka. NU akan melepas anggota-anggotanya untuk secara individual memperjuangkan aspirasi politik dengan cara mengembangkan budaya politik yang sesuai dengan ajaran yang menjadi pegangannya. NU menggiatkan programnya di bidang dakwah, pendidikan dan pengajaran serta sosial ekonomi.

Banyak pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar kenapa mesti kembali ke khittah NU. Ketika disampaikan di forum muktamar, para peserta muktamar merasakan, bahwa sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, NU sejak semula mampu mengikat anggotanya menjadi himpunan kekuatan sosial yang



besar dan tangguh. Tapi karena kurangnya ikhtiar kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masa, maka NU mengalami hambatan dalam perkembangannya.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, secara tidak disadari NU telah menjadi kurang peka dalam menanggapi perkembangan keadaan, khususnya yang menyangkut kepentingan umat dan bangsanya. Salah satu sebabnya ialah keterlibatannya secara berlebihan dalam kegiatan politik praktis, yang pada gilirannya menjadikan NU tidak lagi berjalan sesuai dengan kelahirannya sebagai jam'iyah yang ingin berkhidmah secara nyata kepada agama, bangsa, dan negara. Bahkan telah mengaburkan hakikat NU sebagai gerakan yang dilakukan para ulama.

Sejak kelahirannya, NU telah mengikatkan dirinya dengan kesepakatan-kesepakatan nasional yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mewujudkan tekad itu dalam amal nyata. Para alim ulama NU sebagai tiang utama jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika itu menyadari sepenuhnya adanya keprihatinan terhadap NU, sehingga merasa perlu memberikan penegasan, pedoman, dan petunjuk demi kelancaran dan kemasalahatan organisasi sesuai dengan maksud kelahirannya.

NU didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menganut salah satu di antara madzhab 4, serta berkhidmah kepada bangsa, neg-

ara, dan umat Islam.

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, diputuskanlah bahwa NU kembali ke khittahnya. Khittah NU 1926 itu dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertingkah laku bagi warga NU dalam semua tindak dan kegiatan (organisasi), serta dalam setiap pengambilan keputusan. Landasan tersebut dapat diperoleh dengan mengambil intisari cita-cita dasar didirikannya NU sebagai wadah pengkhidmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT.

Dari dokumen historis berupa "Statuten NU 1926" tercermin kuat bahwa ikhtiar yang hendak dilakukan NU berakar pada pengabdian di bidang keilmuan, kepekaan terhadap masalah sosial khususnya untuk mengatasi penderitaan fakir miskin, serta keinginan yang jelas untuk memajukan bidang sosial ekonomi masyarakat. Sejarah perkembangannya kemudian menunjukkan, NU juga telah melibatkan diri pada perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Pemulihan khittah NU 1926 dengan demikian tidak lain kembali kepada semangat yang dilandasi oleh kekuatan yang mendorong didirikannya jam'iyah ini

Rais Aam dan "arsitek kepala" penyusunan konsep kembali ke Khittah NU, alamaghfurlah KH Ahmad Siddiq mengemukakan bahwa keputusan kembali ke khittah merupakan salah satu terobosan supaya NU dapat mengejar ketertinggalannya dari gerak sejarah yang terus berjalan cepat. Supaya NU

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai jam'iyah diniyyah Islamiyyah, sekaligus meningkatkan kualitas pribadi-pribadi warganya. Dua aspek yang saling terkait. Karena hanya pribadi-pribadi yang berkualitas, mampu mewujudkan jam'iyah yang berkualitas. Jika NU telah menjadi jam'iyah yang berkualitas dengan berjuta-juta anggotanya, pasti akan dapat menjadi bagian sangat penting potensi Indonesia. Sekaligus merupakan bagian dari kekuatan Islam pada skala nasional maupun internasional.

KH. Ahmad Siddiq berpengharapan besar dan sangat optimistis dengan keputusan kembali ke khittah. Dalam pidato halal bihalal di gedung PWNU Jawa Timur 12 Juni 1989, di hadapan pimpinan-pimpinan NU seluruh Jawa Timur, dua garapan besar dalam rangka kembali ke khittah diungkapkannya. *Pertama*, peningkatan wawasan orang-orang NU. *Kedua*, peningkatan kemampuan dan keterampilan orang-orang NU dalam bidang tugas pekerjaan masing-masing.

Sejumlah contoh diungkapkan di bidang pengembangan wawasan orang-orang NU. Antara lain, mengembangkan orang-orang NU menjadi negarawan yang patuh kepada konstitusi, berkhidmah kepada rakyat, bangsa, dan negara. Melahirkan politisi, intelektual, administrator, tokoh pemersatu, dan budayawan yang berkualitas, yang berbobot. Punya jiwa kepeloporan dan keteladanan. Demokratis dan dialogis, berwibawa, dan mendapat dukungan moral dari rakyat. Berpandangan luas dan mendalam ter-

hadap masalah-masalah nasional dan internasional. Peka terhadap perubahan nilai-nilai sosial dan momen-momen strategis. Memiliki jatidiri yang berkarakter cinta kasih, mengabdikan kepada kejujuran, kearifan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian NU akan punya wawasan nusantara, merasa bertanggung jawab dan merasa ikut memiliki Indonesia dari generasi ke generasi.

Garapan lainnya ialah peningkatan keterampilan orang-orang NU dalam bidang tugas masing-masing. Sebagai ulama, misalnya, ilmunya harus dalam, mumpuni, berwibawa dan menjadi panutan umat. Sebagai petani, semakin terampil dan bertambah banyak pengetahuan pertaniannya. Sebagai buruh, tahu dan semakin mampu memenuhi kewajibannya, serta faham dan dapat memperoleh hak-haknya. Sebagai birokrat, penuh dedikasi dan menjunjung tinggi amanat jabatannya, dan seterusnya.

KH Ahmad Siddiq pula yang menegaskan, kalau saja NU tidak mengambil keputusan kembali ke khittah, ada yang memprediksi bahwa NU akan tercabik-cabik, terpecah belah. Bukan saja orang luar NU yang memperebutkan dukungan suara warga NU, tetapi orang-orang NU sendiri juga saling memperebutkannya untuk memenangkan Pemilu yang dia punya kaitan kepentingan. Prediksi itu tidak menjadi kenyataan karena kembali ke khittah, tidak sungguh-sungguh mendukung dan melaksanakannya. Maka kejadiannya menjadi seperti belakangan ini.

Sepeninggal KH. Ahmad Siddiq,

Nahdlatul Ulama sebenarnya menghadapi ujian berat. Citra NU bergeser dari sebagai organisasi keagamaan Islam menjadi semacam pseudo partai politik lagi. Fenomena tersebut tidak terpisahkan dari perkembangan yang dialami NU dalam dua dekade terakhir. Ada beberapa fenomena penting yang berkaitan dengan prediksi KH. Ahmad Siddiq. Walaupun formalnya kepengurusan PBNU tidak membatalkan ketetapan kembali ke Khittah NU 1926, tetapi dengan berhelah, hakekatnya telah menciderainya.

Bulan Juni 1998, PBNU memfasilitasi lahirnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Kebijakan tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan warga NU sendiri. Akibatnya, lahirlah Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI). Sementara itu, sebagian cukup besar warga NU yang lain tetap bertahan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Perkembangan berikutnya lagi, Ket-

ua Umum PBNU Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI. Melalui muktamar pada Nopember 1999, Abdurrahman Wahid lengser sebagai ketua umum PBNU yang telah dijabatnya selama 15 tahun, walaupun dalam ketentuan organisasi yang ditetapkan muktamar sebelumnya ketua umum hanya boleh menjabat dua periode. Kepemimpinan beralih dari 'duet' KH. Ilyas Ruchiat - KH Abdurrahman Wahid ke tangan KH. MA Sahal Mahfudz (Rais Aam PBNU) - KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU).

Belum 2 tahun duet baru kepemimpinan PBNU itu terpilih di Kediri, citra NU terasa bergeser dari sebagai organisasi keagamaan Islam menjadi semacam pseudo partai politik. Citra tersebut terbentuk oleh pernyataan-pernyataan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang dampaknya terlihat pada sikap dan kegiatan sebagian perangkat dan pengurus NU di sebagian daerah, utamanya di Jawa Timur.

Masa itu, pada setiap kesempatan menyampaikan pidato ataupun wawancara pers, Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi hampir tidak pernah absen dari membela Presiden Abdurrahman Wahid. Sampai-sampai ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya Ajinomoto karena waktu itu ada unsur babi dalam proses pembuatannya, dan pengharaman itu ditentang oleh KH. Ab-



durrahman Wahid, oleh KH. Hasyim Muzadi penghormatan itu dikaitkan sebagai usaha menggoyang pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Padahal yang bertanggung jawab atas fatwa tersebut Ketua Umum MUI, yang juga Rais Aam PBNU., KH. MA Sahal Mahfudz. Kiai Sahal segera membantah sinyalemen tersebut, ketika ditanya komentarnya oleh wartawan, sambil menyatakan tidak tahu kalau KH. Hasyim Muzadi mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya "tabrakan" itu karena ketua umum melangkah tanpa konsultasi dengan Rais Aam-nya. "Tabrakan" lainnya juga terjadi. Karena tidak sependapat, mungkin bercampur rasa risih dan tidak memperoleh peluang melakukan koreksi internal, Ir H Salahuddin Wahid, salah satu Ketua PBNU dan adik Presiden Abdurrahman Wahid, melepas kritiknya.

Ketika diwawancarai wartawan setelah mengikuti diskusi bertajuk "Khittah NU 1926 dan Kecenderungan Menguatnya NU Politik", Salahuddin mengingatkan (Republika, 24/1) agar NU menjaga jarak dengan kekuasaan. Tidak pada tempatnya pembelaan NU terhadap Presiden Abdurrahman Wahid atas tindakannya dalam pemerintahan. "NU bukan partai politik. Jadi seharusnya yang berbuat banyak untuk membela Abdurrahman Wahid adalah partai tempat Abdurrahman Wahid berinduk, yaitu PKB." Katanya lagi, NU malah harus ikut memberikan koreksi dan tidak sebaliknya menjadi bumper presiden.

NU mempunyai beberapa badan

otonom/organisasi *onderbouw*, di antaranya yang waktu itu banyak disebut-sebut yaitu Banser (bagian dari Gerakan Pemuda Ansor). Juga punya beberapa lembaga pendukung, seperti Lembaga Pencak Silat (LPS) Pagar Nusa, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP-2NU) dan sebagainya.

Banser dan LPS Pagar Nusa waktu itu citranya sebagai kekuatan "tempur" NU dalam usaha membela Presiden Abdurrahman Wahid untuk tetap memegang jabatan Presiden sampai 2004.

Peristiwa lain yang menjadi fenomena penting juga, majunya KH. Hasyim Muzadi yang sedang memegang jabatan ketua umum PBNU menjadi calon wakil presidennya dari calon presiden Megawati. Karena sebagai ketua umum PBNU harus menanggalkan jabatannya untuk sementara, paling tidak ada waktu jeda yang cukup panjang berhenti mengurus NU, kecuali yang berkaitan dengan pengumpulan dukungan suara dari lingkungan NU. Dan suara warga NU pasti terpecah karena di pihak lain, Ir.H. Salahuddin Wahid yang mengundurkan diri sebagai ketua PBNU, tampil sebagai calon wakil presiden Wiranto.

Bagaimana keadaan masa-masa belakangan ini? Sejak lama sudah ada usaha memagari eksponen pengurus NU supaya tidak terlibat dengan kepemimpinan partai politik. Pengurus harian NU dan ormas-ormasnya, dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik. Pagar ini ternyata tidak begitu ampuh. Karena tanpa duduk dalam kepemimpinan, seorang pengurus NU atau ormas-

nya bisa berkiprah bekerja sama dengan partai politik. Padahal posisinya adalah pimpinan organisasi dan menjadi teladan bagi para anggotanya, di PW, PC, sampai MWC NU.

NU tercabik-cabik sebagaimana di prediksi KH. Ahmad Siddiq terlihat jelas ketika Pilkada Jawa Timur. Warga NU ada yang mendukung Saifullah Yusuf yang bekerjasama dengan pihak lain, karena Saifullah Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor. Ada yang mendukung Ali Maschan Musa, yang bekerjasama dengan pihak lain, karena sebelumnya dia Ketua PWNU Jawa Timur. Ada yang yang mendukung Kho-fifah Indar Parawansa, karena dia sangat dikenal sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Di sisi lain suasananya tidak kunjung sepi berseliweran isu maraknya politik uang, *money politic*. Ada pula yang menggunakan organisasi NU atau ormasnya untuk menjadi pendukung. Adakah pengarahan dan penataan dari Pengurus Syuriah PBNU untuk dilaksanakan oleh Pengurus Tanfidziyah PBNU? Jawabannya tidak jelas. Atau bolehkah begitu saja petinggi PBNU mendukung salah satu di antara kader-kader NU yang bertarung sambil menggerakkan organisasi untuk itu?

Menghadapi Pilpres 2009 seberapa jauh organisasi NU dilibatkan, formal maupun informal? Atau adakah NU memberikan arahan, bukan arahan pribadi salah satu petinginya, melain-

kan hasil rapat berdasar petunjuk Pengurus Syuriah PBNU?

Salah satu kurang berhasilnya prinsip kembali ke Khittah NU 1926, yang mengembalikan pimpinan NU kepada para ulama melalui majelis Syuriah PBNU, adalah karena tidak cukup aktifnya lembaga itu. Serta tidak aktif dan kreatifnya Pengurus Tanfidziyah menggalikan arahan dari lembaga syuriah tersebut.

Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, baru mulai melansir gagasan tentang bagaimana hubungan NU dengan partai politik. Kepada Rakernas Muslimat NU yang berlangsung di Makasar, KH. Hasyim Muzadi minta Rakernas Muslimat NU merumuskan rekomendasi tentang hubungan NU dengan partai politik. Di antara alasannya partai-partai berbasis NU elektabilitasnya anjlok dengan segala sebabnya, dan adanya berbagai tantangan yang dihadapi tugas keberadaan NU. Namun sebenarnya ada keputusan muktamar NU yang menegaskan NU menetapkan jarak sama dengan partai politik manapun.

Berfungsi penuhnya Majelis Syuriah PBNU untuk mengemban amanat kembali ke Khittah NU 1926, agaknya paling menentukan jika ingin menormalisasi perjalanan NU ke depan. Disertai kepatuhan Pengurus Tanfidziyah kepada keputusan Syuriah, serta aktif dan kreatifnya usaha menggalikan arahan Syuriah. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*[1]